



Aset Vol 6, No 1, 2017, pp: 166 - 179

JURNAL AKUNTANSI RISET

<http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>

THE IMPACT OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE AND SIZE OF THE LEGISLATIVE ON LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE (A STUDY IN PROVINCIAL GOVERNMENT IN INDONESIA)

Febrina Lastiar Hutapea¹, Aristanti Widyarningsih²

Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung

Info Article

Received : 10-11-2016
 Revision: 08-12-2016
 Published: 14-02-2017

Keywords:

Good Government
 Governance, size of the
 Legislative, the Local
 Government Performance, the
 GDP Per Capita, Poverty
 Rate, Independence Ratio

Abstract

The purpose of the study is to test the effect of the Good Government Governance and the size of the legislative on the performance of local government. The variables tested in the study consist of Good Government Governance measured by the rank of Indonesia Governance Index (IGI) and the size of the legislative by using the number of members of the provincial parliament, and also local government performance measured by three proxies, the GDP per capita, Poverty Rates, and independence Ratios. The study is conducted in 33 provinces in Indonesia in 2012. The Multiple Regression Analysis is used for data analysis and hypothesis testing completed by using t-statistics at 5% significance level.

The results show that there is no significant effect of good government governance on local government performance by proxy of GDP per capita. There is significant impact of good government governance on local government performance by proxy of Poverty Level. There is no significant influence of good government governance on performance of local governments by proxy of Independence ratio. There is no significant effect on the size of the legislative on the performance of local government by proxy of the GDP Per Capita. There is no significant impact on the size of the legislative on the performance of local government by proxy of Poverty Rates and there is significant effect of the size of the legislative on the performance of local government by proxy of Independence ratio

PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA)

Abstrak

Kata Kunci:

Good Government
 Governance, Ukuran
 Legislatif, Kinerja
 Pemerintah Daerah, PDRB
 Per Kapita, Tingkat
 Kemiskinan, Rasio
 Kemandirian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Good Government Governance dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari Good Government Governance diukur dengan hasil peringkat Indonesia Governance Index (IGI) dan ukuran legislatif dengan menggunakan jumlah anggota DPRD provinsi, serta kinerja pemerintah daerah diukur dengan tiga proksi yaitu PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Rasio Kemandirian. Penelitian dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Regresi Analisis Berganda digunakan untuk analisis data, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-statistik pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita, terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan dan terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian.

Copyright ©2017. Published by Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

Correspondence author:

FPEB. Universitas Pendidikan Indonesia

¹Email : febrina.lastiar@student.upi.edu²Email: aristanti.widyarningsih@upi.edu

ISSN

2541-0342(online)

2086-2563 (print)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Namun kebebasan yang diberikan merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya serta berkomitmen yang tinggi guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan harapan memberi dampak positif bagi kepentingan publik dalam menciptakan strategi pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan juga mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mardiasmo, 2004). Selain itu lahirnya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009).

Di mata masyarakat kinerja pemerintah selalu menjadi suatu perhatian besar dan masyarakat pun sering melakukan penilaian atas hasil capaian pelaksanaan suatu program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk memaksimalkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja pemerintah tidak dapat dilakukan berdasarkan besar/kecilnya laba/keuntungan yang diperoleh, karena pemerintah bukan entitas bisnis yang menilai kinerja berdasarkan laba. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan dan operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Besarnya realisasi anggaran dan jenis belanjanya mengindikasikan besarnya komitmen dan keseriusan suatu pemerintahan daerah pada aspek-aspek yang menjadi prioritas daerah.

Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2011 – 2012

No	Pulau	2011			2012		
		PDRB Per Kapita	Tingkat Kemiskinan	Rasio Kemandirian	PDRB Per Kapita	Tingkat Kemiskinan	Rasio Kemandirian
1	Pulau Sumatera	13.12	11.89	0.99	13.98	11.22	0.94
2	Pulau Jawa	8.30	11.13	2.72	7.79	10.54	3.70

3	Pulau Bali dan sekitarnya	22.27	15.05	1.25	24.24	14.13	1.12
4	Pulau Kalimantan	14.28	6.81	1.05	16.36	6.39	1.04
5	Pulau Sulawesi	22.70	13.64	0.68	22.75	12.61	0.64
6	Pulau Maluku	71.15	16.09	0.20	70.94	14.41	0.21
7	Pulau Papua	29.85	31.95	0.15	31.30	28.85	0.20
Total		181.67	106.56	7.03	187.36	98.14	7.86
Rata-rata		25.95	15.22	1.00	26.77	14.02	1.12

Sumber : www.dpj.k.co.id (data diolah)

Dari tabel diatas menunjukan bahwa kinerja pemerintah provinsi pada tahun 2011 ke tahun 2012 menunjukkan kenaikan kinerja disetiap bidang yaitu PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Rasio Kemandirian. Angka dalam tabel 1.1 membuktikan kenaikan kinerja provinsi telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing provinsi. Hasil dari total PDRB pada tahun 2011 berada pada angka 181,67 dan mengalami peningkatan sebesar 6.31 pada tahun 2012, yang berada dititik 187,36. Selanjutnya pada tingkat kemiskinan pun mengalami peningkatan sebesar 8,42 yang pada tahun 2011 berada di titik 106,56 menjadi 98,14 pada tahun 2012. Pada Rasio Kemandirian juga menunjukkan peningkatan kinerja yang sebelumnya pada tahun 2011 berada di titik 7,03 menjadi 7,86 pada tahun 2012. Namun bila diperhatikan dengan seksama terdapat beberapa pulau di Indonesia mengalami penurunan kinerja, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing pemerintah provinsi.

Penurunan kinerja pemerintah daerah dapat menunjukan kemungkinan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, akibat menurunnya perhatian pemerintah dalam menjalankan program kerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya kinerja pemerintah, salah satunya faktor internal masing-masing pemerintah provinsi itu sendiri. Handi dan Bambang (2016), menyatakan bahwa kinerja sebuah pemerintah daerah akan lebih baik bila prinsip-prinsip *good government governance* diterapkan pada pemerintah daerah. Selain itu Hardiwinoto (2004) juga mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* akan menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomis. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting dan dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu respon terhadap *good government governance* ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup *concern* mengenai hal ini.

Selain *good government governance* yang diduga mempengaruhi kinerja pemerintah adalah ukuran legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang akhirnya terbentuk titik temu bahwa semakin besar anggota legislatif maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah atau sebaliknya (Sumarjo,2010). Kusumawardani (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara logika semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan dalam bekerja. Tingkat kemauan dalam bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah.

Beberapa penelitian mengenai *good government governance* dan prinsip-prinsip telah banyak diteliti. Salah satunya adalah hasil penelitian Suryo Pratolo (2010) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Selain itu penelitian Handi Y.L dan Bambang Jatmiko (2016) bertolak belakang dengan Suryo Pratolo (2010) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good government governance* dikatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian Media Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa terjadi hubungan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil yang serupa juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rima Novianti, Dwi Fitri Puspa, Daniati Puttri (2016), ditemukan adanya pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun dalam penelitian Hendro Sumarjo (2010) menunjukkan hasil yang berbeda, tidak terdapat pengaruh ukuran legislatif kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian-penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai kinerja pemerintah daerah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis melakukan penelitian dilingkup pemerintah provinsi yang mana belum ada yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya dan penulis menambahkan variabel ukuran legislatif yang diduga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah serta penulis akan melakukan pengujian kembali dengan penelitian sebelumnya mengenai *good government governance* dan ukuran legislatif. Adapun judul penelitiannya adalah **“Pengaruh Good Government Governance dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Studi kasus pemerintahan Provinsi di Indonesia”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu: (1) Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita? (2) Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita? (3) Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan? (4) Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita? (5) Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian? (6) Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui *good government governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita. (2) Untuk mengetahui *good government governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan. (3) Untuk mengetahui *good government governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian. (4) Untuk mengetahui ukuran

legislatif memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita. (5) Untuk mengetahui ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan. (6) Untuk mengetahui ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian.

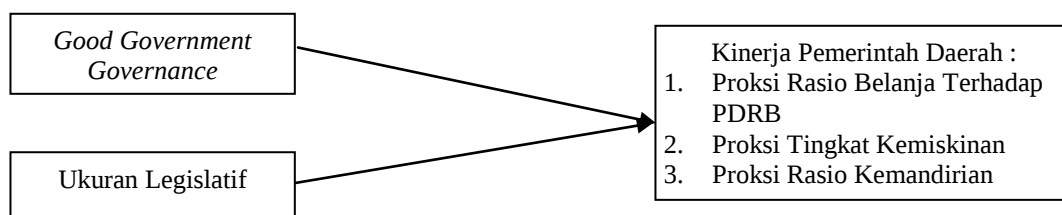
KAJIAN LITERATUR

Good Government Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, *World Bank* dalam Mardiasmo (2009, hlm.18). *World Conference on Governance* dalam Sedarmayanti (2007, hlm. 2) mengatakan bahwa “*Good Government Governance*” suatu pro yang melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat.

Di Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008.

Moeheriono (2012) menyimpulkan definisi kinerja atau *performance* sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan kewewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. *Bernardin dan Russel* (dalam Achmad S Ruky, 2002) mengatakan prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, Mangkunegara (2000, hlm.67).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan pihak penyelenggara setiap urusan pemerintahan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan cerminan terhadap hasil capaian dalam membangun dan mengelola roda perekonomian dilingkup daerahnya. Salah satu penilaian untuk mengetahui perkembangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan

daerahnya dilakukan dengan mengukur kinerja. Banyak faktor yang mendukung dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, salah satunya adalah tata kelola pemerintah atau *good government governance*.

Pengelolaan pemerintah yang kurang baik banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi dimasyarakat. Jika tata kelola pemerintahnya diterapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kinerja pemerintah yang dilakukan akan baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah.

Pemerintah daerah memerlukan pengelolaan perusahaan yang baik atau *good corporate governmance* sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Handi dan Bambang (2016) mengatakan bahwa “kinerja sebuah pemerintah daerah akan lebih baik bila prinsip-prinsip *good government governance* diterapkan pada pemerintah daerah”. Maka secara tidak langsung *good government governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah daerah di provinsi sehingga dapat disimpulkan bahwa *good government governance* memiliki pengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan pemerintah. Ukuran legislatif diukur dengan seberapa besar jumlah anggota DPRD yang memiliki tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Besarnya ukuran legislatif yang terdapat dipemerintah dapat dipastikan semakin cepat dan besar juga program kerja yang dikelola dan semakin kompleks pengelolaannya, dan resiko yang dihadapi pemerintah pun akan semakin tinggi, sehingga pemerintah akan terus meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya demi mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang pemerintah.

Hal ini sama dengan yang dikatakan Widjaja (2007) dalam Rima Novianti, Dwi Fitri Puspa, Daniati Puttri (2016) menyatakan bahwa “Semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan bekerja seseorang terhadap pekerjaannya. Tingkat kemauan dalam bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah. Sehingga dapat bahwa disimpulkan ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita
2. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita
3. *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan
4. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan

5. *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian
6. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian.

METODOLOGI PENELITIAN

Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (independen)
Dimensi pada kinerja pemerintah daerah adalah PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Rasio Kemandirian.
2. Variabel *Good Government Governance* (independen)
Dimensi pada *Good Government Governance* adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.
3. Variabel Ukuran Legislatif (dependen)
Dimensi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau anggota legislatif bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk dapat didayagunakan dengan baik.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi di Indonesia sebanyak 33 provinsi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* dengan teknik sampling jenuh.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data dari IGI dan www.djpk.depkeu.go.id.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis statistik deskriptif.

UJI NORMALITAS

Apabila nilai probabilitas melebihi taraf signifikansi (*asymptotic significant*) yaitu lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data residual telah terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, jika taraf probabilitas kurang dari 0,05 maka data yang dijadikan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Untuk mendeteksi multikolonieritas pada model regresi, salah satu cara adalah dengan menggunakan metode *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) (Husein Umar, 2008:81). Untuk menghitung VIF menggunakan rumus:

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2)}$$

Dan juga dapat diketahui berdasarkan besaran *tolerance* melalui perhitungan rumus:

$$TOL = (1 - R^2)$$

Jadi nilai *tolerance value* yang rendah sama dengan nilai VIF dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Jika nilai *tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Cara untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat Grafik Plot (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

PENGUJIAN HIPOTESIS

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan berapa variabel independen dalam suatu model persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan dan bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2012, hlm. 277).

Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

Keterangan notasi: (Sugiyono, 2010, hlm. 277)

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
- X₁ = *Good Government Governance*
- X₂ = Ukuran Legislatif
- b₀, b₁, b₂ = Koefisien regresi
- e = Koefisien *error* (variabel pengganggu)

UJI SIGNIFIKANSI PARSIAL (UJI STATISTIK T)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesisnya:

a. Hipotesis Pertama

H₀ : β₁ = 0. *Good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita

H_a : β₁ ≠ 0. *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita

b. Hipotesis Kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$. *Good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan

$H_a : \beta_2 \neq 0$. *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan

c. Hipotesis Ketiga

$H_0 : \beta_3 = 0$. *Good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian

$H_a : \beta_3 \neq 0$. *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian

d. Hipotesis Keempat

$H_0 : \beta_4 = 0$. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita

$H_a : \beta_4 \neq 0$. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi PDRB Per Kapita

e. Hipotesis Kelima

$H_0 : \beta_5 = 0$. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan

$H_a : \beta_5 \neq 0$. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Tingkat Kemiskinan

f. Hipotesis Keenam

$H_0 : \beta_1 = 0$. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian

$H_a : \beta_1 \neq 0$. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di provinsi Indonesia dengan proksi Rasio Kemandirian

1. Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$

Tingkat signifikansi 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

2. Menghitung Uji t

$$t_{\text{Hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan: (Husein Umar, 2008)

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

3. Kriteria Pengambilan Keputusan

Dasar pengambilan keputusan dapat dengan dua cara:

a. Dengan membandingkan t hitung dan t tabel.

- Apabila t hitung > t tabel, maka ada pengaruh antara variabel X masing-masing dengan variabel Y. (H_0 ditolak dan H_a diterima)

- Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka tidak ada pengaruh antara variabel X masing-masing dengan variabel Y. (H_a diterima dan H_0 ditolak)
- b. Dengan menggunakan angka signifikansi
 - Apabila angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - Apabila angka signifikansi $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Dari hasil pengujian normalitas diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* atas proksi PDRB Per Kapita sebesar 0,867 yang berarti uji signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,867 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* atas proksi tingkat Kemiskinan sebesar 0,611 yang berarti uji signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,611 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* atas proksi Rasio Kemandirian sebesar 1.451 yang berarti uji signifikansi lebih besar dari 0,05 ($1.451 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan, ditemukan bahwa distribusi data tidak membentuk pola-pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan, ditemukan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas bernilai jauh di bawah 10 yaitu 1,186 dan nilai *tolerance* berada lebih dari 0,1 yaitu di titik 0,843, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi, atau dengan kata lain kedua variabel bebas tersebut telah saling independen.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama dan Kedua

Hasil pengujian hipotesis pertama, besarnya nilai signifikansi adalah 0,276, hal ini berarti lebih dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita. Dari persamaan regresi menunjukkan nilai β_1 sebesar -1.004 menandakan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh negatif dengan kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita. Dan hasil pengujian hipotesis kedua, besarnya nilai signifikansi adalah 0,747, hal ini berarti lebih dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita. Dari persamaan regresi menunjukkan nilai β_2 sebesar -0.009 menandakan bahwa Ukuran Legislatif berpengaruh negatif dengan kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga dan Keempat

Hasil pengujian hipotesis ketiga, besarnya nilai signifikansi adalah 0,003, hal ini berarti lebih dari 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan. Dari persamaan regresi menunjukkan nilai β_3 sebesar -2.026 menandakan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh negatif dengan kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan. Dan hasil pengujian hipotesis keempat, besarnya nilai signifikansi adalah 0,527, hal ini berarti lebih dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan. Dari persamaan regresi menunjukkan nilai β_4 sebesar 0.071 menandakan bahwa Ukuran Legislatif berpengaruh negatif dengan kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita.

Hasil Pengujian Hipotesis Kelima dan Keenam

Hasil pengujian hipotesis kelima, besarnya nilai signifikansi adalah 0,249, hal ini berarti lebih dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian. Dari persamaan regresi menunjukkan nilai β_5 sebesar 4.769 menandakan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif dengan kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian. Dan hasil pengujian hipotesis keenam, besarnya nilai signifikansi adalah 0,000, hal ini berarti kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian. Dari persamaan regresi menunjukkan nilai β_6 sebesar 3.787 menandakan bahwa Ukuran Legislatif berpengaruh positif dengan kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian.
4. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita.
5. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan.

6. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Rasio Kemandirian.

Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian untuk peneliti selanjutnya. Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan prinsip-prinsip *good government governance* dan bila diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus yang mengatur *good government governance* (tata kelola pemerintah) yang dapat dijadikan patokan maupun gambaran bagi pemerintah provinsi.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keterkaitan untuk mengkaji penelitian ini, agar dapat menambahkan variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Periode penelitian dapat ditambah dan mengganti tempat penelitian seperti di Kabupaten/Kota agar memperoleh gambaran populasi yang lebih akurat. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah indikator pengukuran kinerja seperti laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Achmad S Ruky. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) Panduan Praktis Untuk Merancang Dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Budiani. Ni Wayan. 2009. Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Input*. vol. 2 (1) : 49-57
- Daniel Muji & David Reynolds. 2008. *Effective Teaching*. Yogyakarta.
- Hermanson, D., DeZoort, F.T., & Houston, R.W. 2002. Audit Committees, Materiality, and Financial Expertise. *The Journal of Corporate Accounting and Finance*.
- Gede. M. B., Yuniartha. A., & Darmawan. N. A. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

- Handi Y. L Dan Bambang Jatmiko. 2015. *Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 5, No 1
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerbit PT. Grasindo. Jakarta.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Imam Fachruddin. 2009. *Desain Penelitian*. Malang.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima)*. Jurnal Universitas Diponegoro : Semarang.
- Indonesia Governance Index. 2014. *Menata Indonesia dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Indrawan. Rully & Yaniawati. Raden Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (*Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010*). *Governance and Public Policy*. vol. 1 (1): 53-76
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nadia Garini. 2011. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung.
- Nanang Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Salim P. 1991. *Kamus Bahasa Kontemporer*. Jakarta: Modern English Fresh.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung. Penerbit Mandar Maju.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sullistyo-Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryo Patolo. 2010. Peran *Good Government Governance* Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi pada pemerintahan kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Syahrudin Rasul. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusat Bahasa
- Widya Martha. 2014. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung